



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN
BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR
30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



SURYA NINGSIH DAMANIK

11527203971

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU – PEKANBARU
1440 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi"*

Nama : Surya Ningsih Damanik

NIM : 11527203971

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

Ilham Akbar, S.HL., SH., MH.
NIP. 19760420 200901 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI”, yang ditulis oleh :

Nama : **SURYA NINGSIH DAMANIK**
 NIM : 11527203971
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Basir, S.HI., MH

Penguji I
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 1968031 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SURYA NINGSIH DAMANIK
 NIM : 11527203971
 Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 April 1997
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 September 2019
 Yang Membuat Pernyataan

SURYA NINGSIH DAMANIK
 NIM: 11527203971



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Surya Ningsih Damanik (2019): Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama bagi petani. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun dan berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi mengingat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air masih belum optimal dan peraturan menteri sebagai pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air tidak terimplementasi sepenuhnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan apa faktor-faktor penghambat Dinas PU dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dimasyarakat. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala bidang PSDA di pematang raya, Kepala UPTD Bandar, Staf Lapangan dan Petani di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi dilakukan oleh Dinas PU yang dilimpahkan kepada UPTD berdasarkan peraturan menteri PU nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang terdapat pada pasal 33 berbunyi pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh direktorat terkait, balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Dinas PU ataupun UPTD jarang sekali turun ke lokasi persawahan untuk melakukan sosialisasi terhadap petani, memantau atau pengawasan terhadap saluran irigasi secara keseluruhan sehingga terjadinya kecurangan air pada irigasi dan faktor penghambat Dinas PU atau UPTD yaitu kurangnya anggaran, banyaknya saluran irigasi yang perlu diperbaiki dan ada beberapa petani yang melakukan pelobangan saluran air digunakan untuk pembesaran anak ikan sehingga mengganggu jadwal tanam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga,sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sukiman Damanik dan Ibunda tercinta Ngatini yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riaubeserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandri, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
5. Bapak Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
6. Bapak Dr. Maghfirah, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik (PA)beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
9. Bapak Ilham Akbar, SHi, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus untuk Hardi Harfandi, abang kandung Mahyaruddin Damanik, S.P dan adik kandung Heru Kurniawan Damanik dan Keluarga Besar Rumah Suah Damanik, yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
11. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 16 Agustus 2019
Penulis

SURYA NINGSIH DAMANIK
NIM. 11527203971



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika penulisan	16
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Simalungun	18
B. Sejarah Kecamatan Bandar Huluan	19
C. Letak dan Luas Wilayah	21
D. Sejarah Pekerjaan Umum	22
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Peranan	30
B. Teori Pengawasan	34
C. Teori Pemanfaatan	40
D. Teori Irigasi	49
E. Kedudukan dan Mekanisme Pengawasan Dinas PU Tentang Irigasi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	57



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi	69
B. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pekerjaan Umum Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	14
Tabel 4.1	Tanggapan responden mengenai aliran irigasi dipersawahan di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun sudah berjalan dengan lancar.....	73
Tabel 4.2	Tanggapan responden terhadap permasalahan kecurangan air dalam aliran irigasi yang dilakukan seorang petani, apakah ada tindakan dari dinas pu	75
Tabel 4.3	Tanggapan responden apakah ada dinas PU memberikan fasilitas berupa alat untuk memasok air dan adakah pungutan biaya yang di minta oleh dinas PU kepada petani	76
Tabel 4.4	Tanggapan responden terhadap sikap dari dinas PU dalam pengawasan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi jika terjadi musim kemarau dan musim hujan, adakah tindakan dari dinas PU	78
Tabel 4.5	Tanggapan responden adakah pengawasan rutin /pemantauan serta sosialisasi yang dilakukan oleh dinas PU, jika ada berapa kali di lakukan	79

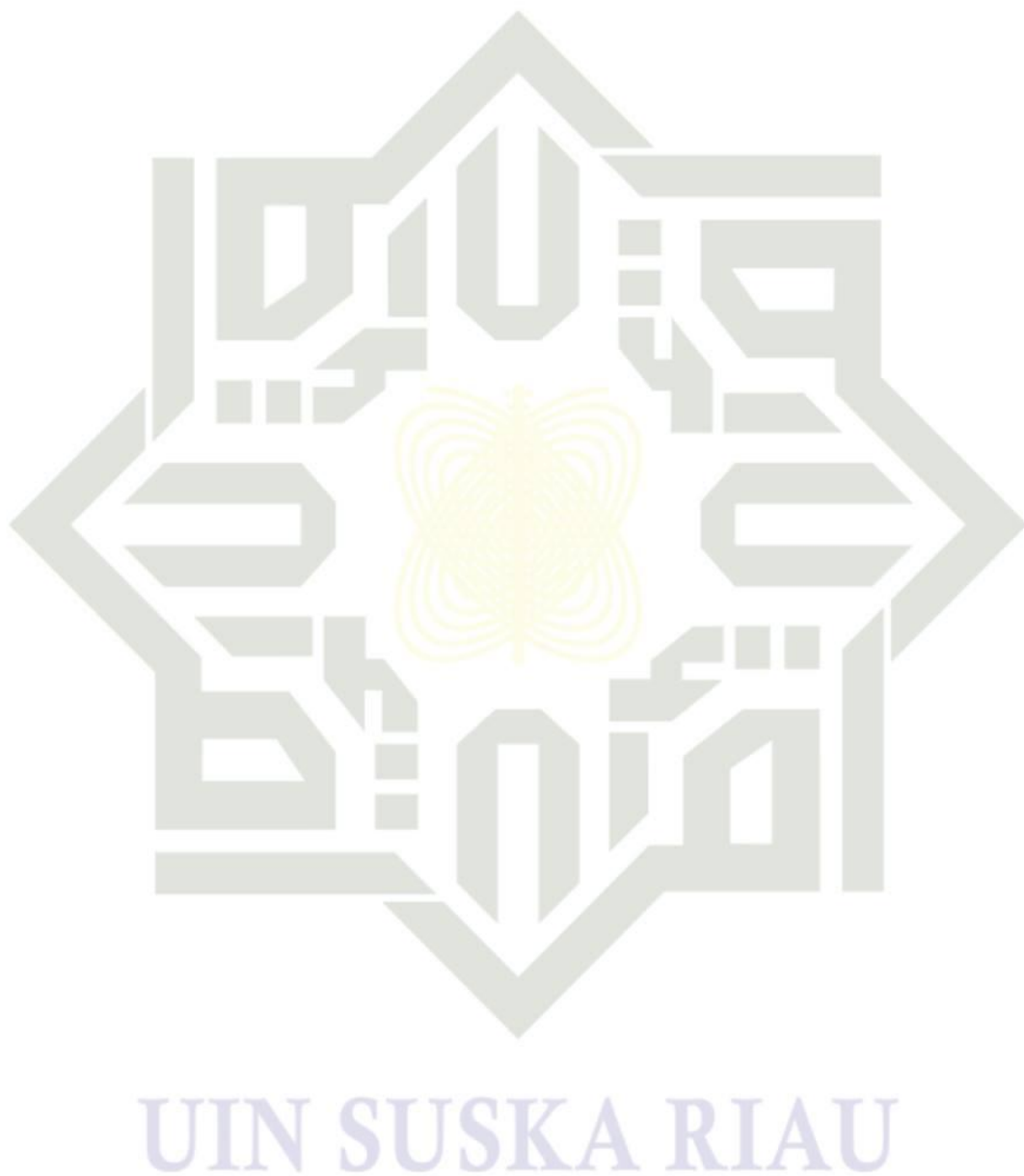
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Psda Bandar	26
-----------	--	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles di dalam bukunya *Politica*, Aristoteles merumuskan pandangannya tentang Negara. Menurutnya Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesia*). Maksud negara hukum ialah negara yang terdiri di atas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Pasca-amandemen UUD 1945 mempertegas deklarasi negara hukum, dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut, Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah:

“ Negara Indonesia ialah negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Sangat jelas bahwa ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*). Indonesia yang mengaku sebagai negara hukum secara otomatis berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana “Problem solving” masyarakat. Agar hukum di negara Indonesia harus

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya.

Berdasarkan pada prinsip negara sebagai terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup yang baik jasmani maupun rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama.

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat yang sangat berbeda dengan sumber daya lainnya. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, bahkan oleh semua makhluk hidup.² Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

“Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, Negara mempunyai wewenang untuk menguasainya. Pengertian dikuasai dipakai dalam aspek publik seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat 2 lebih lanjut memberi makna menguasai sebagai tindakan mengatur, merencanakan sekaligus mengelola dan melestarikannya.⁴ Air merupakan faktor yang penting dalam bercocok tanam. Selain jenis tanaman

² Hefini Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 2003), h.2

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat 3

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan air bagi suatu tanaman juga di pengaruhi oleh sifat dan jenis tanah, keadaan iklim, kesuburan tanah, cara bercocok tanam, luas areal pertanaman, topografi, periode tumbuh dan sebagainya. Cara pemberian air irigasi pada tanaman padi, tergantung pada umum dan farietas padi yang ditanam.

Istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari istilah management, yang mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan atau pemanfaatan, dan pengawasan.⁵ Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UUSDA) yang merupakan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan pada semua aspek kehidupan manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk usaha yang menggunakan bahan dasar air atau sebagai penunjang, termasuk usaha di bidang pertanian. Pada Pasal 41 UUSDA disebutkan bahwa pemenuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang ada pada sumber-sumber air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. Sementara pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

⁵ Bambang iriana djajaatmadja, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas PUPR di bidang PSDA mempunyai fungsi sebagai perumusan perencanaan kebijakan teknis pembangunan, pengelolaan pekerjaan, pengawasan dan pengendalian pekerjaan dari masing-masing bidang yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :

“irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Pasal 3 ayat 1 yang berbunyi :

“pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian”.

Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

“pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada”.

Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

“pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh Direktorat terkait, Balai Besar Sungai/ Balai Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai dan Dinas Provinsi yang melakukan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya ”.⁶

Dalam dunia pertanian, keberlanjutan sumber daya air sangat penting, maka pengelolaan penggunaan air untuk irigasi harus mengacu pada prinsip tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Sebagai tindak lanjut dari UUSDA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi pada ketentuan umum Bab 1 berbunyi:

“irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air”.⁷

Otonomi daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun daerahnya sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Guna mencapai harapan tersebut diberikan otonomi yang

⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi. Pasal 3 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 dan Pasal 33 ayat 1

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk menggali kemampuan dan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.⁸

Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat yaitu kurangnya pelaksanaan pengawasan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi air yang masuk ke sawah-sawah dan ladang-ladang di kecamatan Bandar huluan kabupaten simalungun, padahal setiap staf lapangan UPTD memiliki tugas untuk pengawasan area irigasi, membersihkan saluran irigasi agar bertujuan untuk lebih melancarkan aliran air ke area persawahan sehingga pembagian air dapat terbagi dengan rata. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi risau karena ketakutan kekurangan sumber daya air. Tanaman padi sawah memerlukan cuarah air antara 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun dengan ketinggian tempat optimal 0-1500 mdpl. Masyarakat hanya ingin dinas pekerjaan umum yang di limpahkan kepada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) di bagian staf lapangan lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap irigasi karena setiap staf lapangan mempunyai area irigasi yang harus diawasi dan fasilitas irigasi lebih memenuhi kebutuhan petani seperti memperbaiki atau pembangunan ulang aliran irigasi ke sawah dan ladang agar lebih meningkatkan hasil produksi pertanian.

Pemanfaatan air terbagi menjadi dua macam tujuan yaitu penggunaan untuk pemungutan hasil, misalnya perikanan, tenaga air dan navigasi dan penggunaan bersifat memiliki langsung misalnya untuk irigasi dan untuk

⁸ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad, 2002), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri.⁹ Sumber daya air menjadi sumber daya terpenting setelah lahan, disebabkan air mampu menambah kesuburan tanah sehingga memungkinkan tumbuhnya sumber daya lain seperti vegetasi. Bentuk permukaan tanah secara alami pada hakikatnya mempengaruhi aliran air khususnya di daerah panas. Aliran air membentuk sungai, telaga dan rawa-rawa yang berguna untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi bahkan rekreasi. Sebagian aliran tersebut hilang menguap atau meresap ke dalam tanah membentuk air tanah. Air tanah dan air permukaan keduanya akan memenuhi kebutuhan manusia untuk irigasi maupun kebutuhan air minum. Saat ini hampir tidak ada penggunaan lahan tanpa pemanfaatan air baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Pemanfaatan sumber daya air pada kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun terakhir ini dirasa semakin meningkat, namun dibalik itu ketersediaan jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air bagi pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim hujan pun bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena air hujan tidak dikelola dengan baik, Sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan waktu. Keterbatasan air menyebabkan berkurangnya, jenis dan jumlah produksi pertanian.

Dengan demikian bangunan ukuran debit harus tepat dalam memberikan jumlah air sesuai yang melalui kebijakan tentang pengelolaan sistem irigasi ditingkat usaha tani yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2004

⁹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1988), h.69

¹⁰ *Ibid.* h.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi. Bab XIV pasal 85 yang berbunyi :

“Pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat”.

Pelaksana pelayanan publik atau lazim disebut “pelaksana” adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atasan langsung dan oleh pengawasan fungsional, sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh ombudsman ditingkat provinsi/kabupaten/kota.¹¹

Oleh karena itu, pekerjaan umum di bidang sumber daya air tersebut harus memiliki kualitas, keterampilan, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya agar dapat melayani masyarakat dan juga dapat meningkatkan prestasi kerja yang berdampak baik bagi masyarakat maupun instansi itu sendiri dalam hal ini kinerja sangatlah menentukan keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat berhasil atau berkelanjutan dengan baik. Berdasarkan pemaparan

¹¹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang ada diatas penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dengan judul : **“Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi”**

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan yang akan penulis teliti adalah pengawasan dinas pekerjaan umum terhadap pemanfaatan debit air untuk irigasi berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun yang meliputi pengawasan terhadap pemanfaatan pengaliran air dan pembagian air ke setiap sawah dan ladang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Dinas pekerja umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan masalah Dinas pekerja umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
 - 2) Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
 - 3) Bagi instansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum di Pematang Raya, UPTD Bandar dan Kecamatan Bandar huluan Kabupaten Simalungun.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Anggota Dinas PU, UPTD penyusunan program kerja, staf lapangan, dan masyarakat pertanian.
- b. Objek penelitian ini adalah peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Bandar Hulan.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian¹³ baik dengan metode pengamatan ataupun wawancara, dengan kepala bidang PSDA Dinas PU di Pematang Raya, UPTD menyusun program kerja Bandar, staf lapangan dan masyarakat petani.
- b. Data Sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- c. Data Tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data

¹³ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.30

sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal dan sebagainya.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁵ Adapun metode yang diambil adalah purposive sampling yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang PSDA Dinas PU di Pematang Raya	1 orang	1 orang	100 %
2	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) PSDA Bandar	1 orang	1 orang	100%
3	Staf Lapangan	3 orang	3 orang	100%
4	Masyarakat petani	500 orang	50 orang	10%
Jumlah		505 orang	55 orang	10%

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.98

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan serta sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya atau responden secara lebih mendalam guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan.

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Yang menjawab angket dalam penelitian ini adalah masyarakat (petani).

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

e. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data hasil dokumen atau berkas yang mendukung dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

F. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari gambaran umum, tempat lokasi penelitian yaitu di di kantor Dinas Pekerjaan Umum di Pematang Raya dan UPTD Bandar serta Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Berisi tinjauan umum, yakni pengertian Peranan, Pengawasan, pemanfaatan terhadap saluran irigasi, irigasi di kecamatan Bandar hulan kabupaten simalungun serta kedudukan peraturan menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- B. Faktor-faktor penghambat dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****A. Sejarah Kabupaten Simalungun**

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia maka berdasarkan Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Simalungun dengan 16 kecamatan yang berasal dari 16 distrik pada masa pemerintah Belanda dan berkembang menjadi 17 kecamatan yaitu Kecamatan Dolok Pardamean. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 dilaksanakan pemekaran kecamatan dari 17 kecamatan menjadi 21 kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raya, Ujung Padang dan Tapan Dolok.

Satu hal penting dalam sejarah pemerintah di Simalungun adalah ditetapkannya Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun pada tanggal 25 April 1995 sebagai salah satu dari 25 Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah. Pada pelaksanaannya, penyerahan urusan, baik yang berasal dari pusat maupun Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara meliputi 22 bidang, 108 sub bidang dan 475 urusan yang ditangani oleh 24 dinas daerah.

Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dampak pemberlakuan undang-undang ini yang paling nyata adalah munculnya wilayah-wilayah pemekaran mulai dari tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Kabupaten Simalungun juga mengalami pemekaran wilayah desa/kelurahan dan kecamatan dimana sebelumnya terdiri dari 21 kecamatan dimekarkan menjadi 30 kecamatan.

Pemekaran wilayah tersebut meliputi Kecamatan Sidamanik yang dimekarkan menjadi Kecamatan Sidamanik dan Pematang Sidamanik, Kecamatan Tanah Jawa menjadi Kecamatan Tanah Jawa dan Hatonduhan, Kecamatan Huta Bayu Raja menjadi Kecamatan Huta Bayu Raja dan Jawa Maraja Bah Jambi, Kecamatan Panei menjadi Kecamatan Panei dan Panombeian Panei, Kecamatan Siantar menjadi Kecamatan Siantar, Gunung Malela dan Gunung Maligas, Kecamatan Bandar menjadi Kecamatan Bandar dan Bandar Masilam, Kecamatan Pematang Bandar menjadi Kecamatan Pematang Bandar dan Bandar Huluan, Kecamatan Purba menjadi Kecamatan Purba dan Haranggaol Horisan.¹⁶

B. Sejarah Kecamatan Bandar Huluan

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tentang pemerintahan daerah, tugas dan fungsi kecamatan berubah dari yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Pada tahun 1999 terjadi pemekaran dari kecamatan Pematang Bandar yang luas Wilayah 230,64 km dan 19 nagori/ kelurahan (dimekarkan). Disamping pemekaran kecamatan terjadi pula pemekaran nagori yang mulai dari pembentukan nagori persiapan.

¹⁶Repository.usu..ac.id.Sejarah Kabupaten Simalungun. Diakses pada tanggal 17 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud dengan nagori persiapan adalah suatu wilayah tertentu yang akan dikembangkan menjadi nagori yang otonomi. Kecamatan Pematang Bandar dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Bandar yang luas wilayahnya 230,66 km dan 10 nagori/ kelurahan dan Bandar Huluan yang luas wilayahnya 107,33 km dan 9 nagori/ kelurahan.

Kecamatan Bandar Huluan mencakup 10 Nagori/Desa dan belum memiliki kelurahan, dimana 1 Nagori berstatus swakarsa dan 9 lainnya telah berstatus swasembada dengan ibu kota kecamatan adalah Nagori Naga Jaya 1. Setiap Nagori membawahi dusun sebagai lingkungan administrasi terkecil dimana jumlah dusun terbanyak adalah sebagai berikut :

- a. Nagori Jaya memiliki 16 Dusun.
- b. Bandar Tongah memiliki 15 Dusun.
- c. Nagori Bah Gunung memiliki 5 Dusun.
- d. Nagori Dolok Parmonangan memiliki 10 Dusun.
- e. Nagori Naga Jaya II memiliki 8 Dusun.
- f. Nagori Tanjung Hataran memiliki 8 Dusun.
- g. Nagori Bandar Betsy I memiliki 5 Dusun.
- h. Nagori Bandar Betsy II memiliki 5 Dusun.
- i. Nagori Naga Sopa memiliki 4 Dusun.
- j. Nagori Laras memiliki 3 Dusun.

Masyarakat kecamatan Bandar Huluan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yaitu bercocok tanam padi, jagung, cabe, kebun sawit dan karet. Karena padi sebagai bahan makanan pokok sehari-hari jagung, cabe sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pangan tambahan jika padi tidak mencukupi. Ini disebabkan karena letak geografis tempat tinggal yang berada di daerah yang hawanya sejuk, tanahnya subur dan sesuai untuk bercocok tanam, sehingga sejak dulu dan sekarang mereka hidup dari bersahabat dengan alam dan terbiasa dengan kehidupan gotong royong dalam membantu semua kegiatan.

Masyarakat kecamatan Bandar Huluan beragama dan bersuku tidak merata dalam artian masih mengelompokkan diri pada suatu wilayah tertentu. Beragama Islam 69,447 %, beragama Katolik 3.053%, beragama Protestan 15.85%, beragama Hindu 5%, beragama Budha 1,1%, dan beragama lainnya 6%. Di kecamatan Bandar Huluan terdapat 8 etnis yaitu suku Batak Simalungun, suku Batak Toba, suku Karo, suku Mandailing, suku Jawa, suku Melayu, suku Pak-Pak, suku Nias.¹⁷

C. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Bandar Huluan sebagai salah satu kecamatan di kabupaten simalungun yang memiliki luas 107,33 km² dengan letak sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Bandar Masilan, sebelah selatan dengan kecamatan Gunung Maligas dan Gunung Malela, sebelah Barat dengan kecamatan Dolok Batu Nanggar dan sebelah timur dengan kecamatan Pematang Bandar.

Letak kecamatan Bandar Huluan di atas permukaan laut adalah 26-100 meter dimana pada ketinggian 26-50 meter seluas 2.250 Ha dan ketinggian 51-

¹⁷ Kabupaten Simalungun, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun, Diakses Pada Tanggal 15 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100 meter seluas 7.985 Ha dari keseluruhan luas wilayah yang berada pada ketinggian 0-100 meter di atas permukaan laut seluas 10.235 Ha.

Menurut kemiringan/kelerengan tanah, luas wilayah kecamatan Bandar Huluan terdapat pada lahan yang kemiringannya 0-2° seluas 9.550 Ha dan 2-15° seluas hanya 685 Ha.¹⁸

D. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 30 tentang Peraturan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Simalungun mengeluarkan peraturan nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.

Peraturan tersebut pada pasal 30 mengenai kedudukan dan tugas pokok dari dinas pengelolaan sumber daya air, pengairan yang dimana kedudukannya merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten Simalungun. Dan bertugas sebagaimana melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang pengelolaan sumber daya air memiliki kontribusi yang vital dan berdimensi strategi bagi pembangunan serta sebagai prekat kesenjangan

¹⁸<http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>. Diakses tanggal 15 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administrasi dan peningkatan sumber daya air untuk meningkatkan kemakmuran daerah seperti pertanian dan perikanan.

Pertama kali kantor dinas pekerjaan umum didirikan di kota Pematang Siantar pada tahun 1998. Kemudian ibu kota kabupaten telah resmi berpindah ke Pematang Raya pada tanggal 23 Juni 2008 dari kota pematang siantar yang telah menjadi daerah otonom, setelah tertunda selama beberapa waktu.¹⁹ Dan sampai dengan sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala dinas di dinas pekerjaan umum, adalah sebagai berikut :

- a. RIZAL ALAM LUBIS (1998)
- b. JONNER SIBARANI (2000)
- c. ANTONIUS DAMANIK (2003)
- d. RAMADANI PURBA (2005)
- e. JANNAS MALAM (2009)
- f. DEBORA (2013)
- g. RESMAN SARAGIH (2015)
- h. BENNY S.H SARAGIH, ST,M. Si (2017-sekarang)

¹⁹ Arsip Dokumen dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Visi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun adalah tersedianya infrastruktur pekerjaan umum yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera. ” Sedangkan Misinya adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas serta terkondisinya jalan/jembatan menjadi baik dalam rangka pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia.
- c. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumber daya air, untuk mendukung ketahanan pangan dan terkondisinya jaringan irigasi, serta mengamankan pusat-pusat produksi dan pemukiman dari daya rusak air.
- d. Meningkatkan kualitas penataan ruang terbuka hijau/taman perkotaan/penerangan jalan yang asli, aman dan nyaman bagi masyarakat.

3. Fungsi dan Peran Pekerjaan Umum

- a. Fungsi Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum pengairan.
- 2) Penyusunan, perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta pemanfaatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

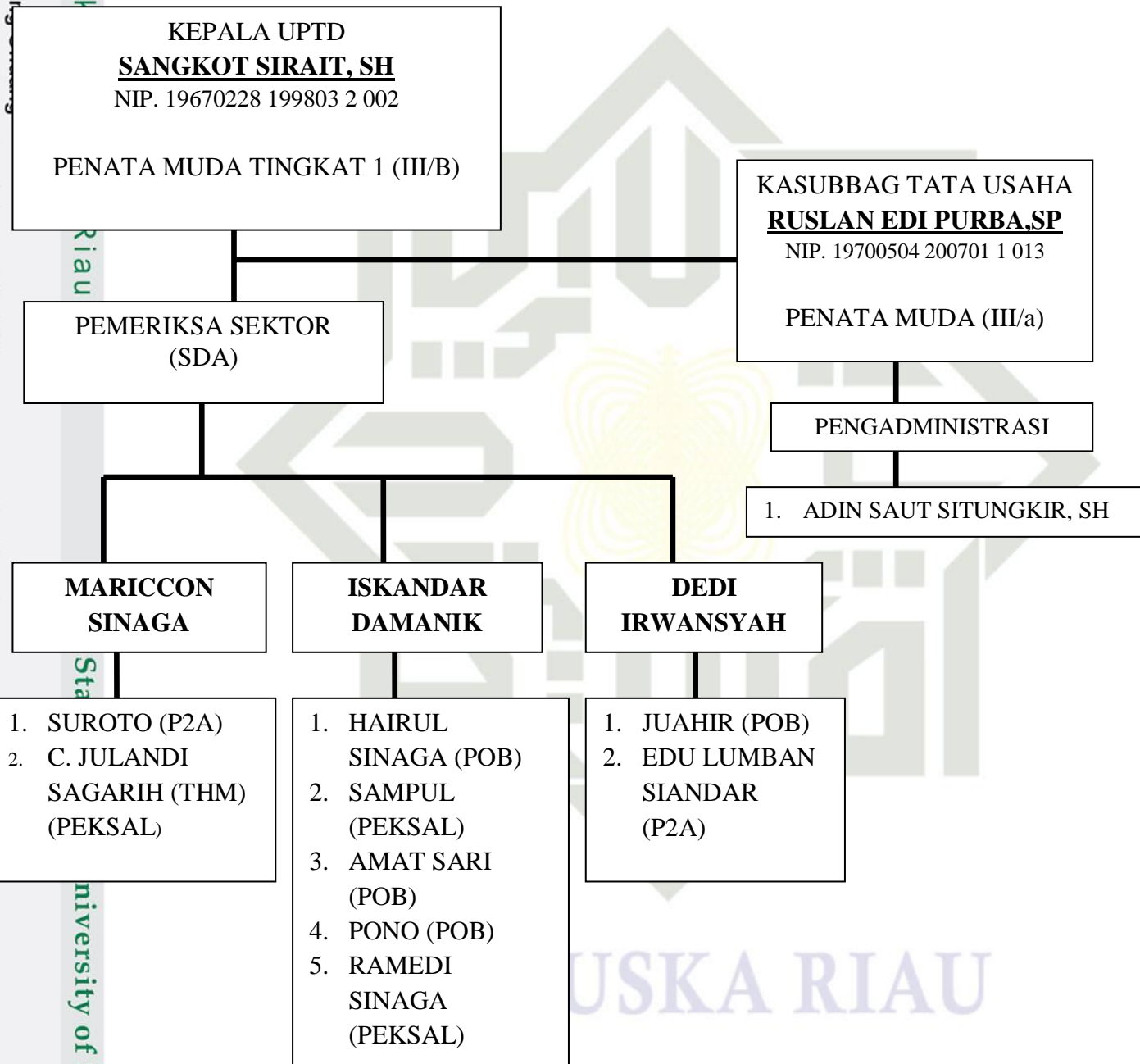
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prngairan/ sumber daya air
 - 4) Pelaksanaan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air serta pemeliharaan jaringan pengairan/sumber daya air.
 - 5) Pelaksanaan eksploitasi, pengendalian, penanggulangan bencana banjir dan kekeringan.
 - 6) Pembinaan, bimbingan, dan pemberian perijinan di bidang pengairan/sumber daya air.
 - 7) Pemberian dan pelaksanaan perijinan terhadap penetapan, perubahan atau pembongkaran bangunan yang berada di perairan umum.
 - 8) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan peralatan/ perbekalan serta pemberdayaannya.
 - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas dan Pengendalian pelaksanaan unit pelaksana teknis.
 - 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Peranan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air dalam melaksanakan tugas mempunyai peran yaitu melakukan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air serta yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang

BAGAN 2.1
STRUKTUR UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS PSDA BANDAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian.
 - 2) Sub bagian keuangan.
 - 3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
- c. Bidang Bina Teknik, terdiri dari
 - 1) Seksi perencanaan teknik jaringan jalan dan irigasi
 - 2) Seksi perencanaan teknik gedung, tata ruang dan sarana permukiman.
 - 3) Seksi jasa konstruksi dan pengujia.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari
 - 1) Seksi pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
 - 2) Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - 3) Seksi alat-alat berat dan kendaraan bermotor.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari
 - 1) Seksi penataan bangunan dan gedung.
 - 2) Seksi saranan dan prasarana permukiman.
 - 3) Seksi pengembangan sistem penyediaan air minum.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari
 - 1) Seksi pembangunan dan peningkatan sumber daya air.
 - 2) Seksi eksploitasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air.
 - 3) Seksi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air.
- g. Bidang Perumahan dan Tata Ruang, terdiri dari
 - 1) Seksi perumahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seksi evaluasi bantuan pembiayaan perumahan.
- 3) Seksi tata ruang.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - 1) Kepala unit pelaksana teknis pendapatan kecamatan
 - 2) Kepala sub bagian tata usaha

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang Kabupaten Simalungun sebanyak 14 UPT, sebagai berikut :

1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bandar, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Bandar Huluan
 - b. Kecamatan Pematang Bandar
 - c. Kecamatan Bandar Masilam
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Bosar Maligas, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Dolok Masagal
 - b. Kecamatan Dolok Batu Nanggar
 - c. Kecamatan Dolok Panribuan
 - d. Kecamatan Dolok Pardamean
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Dolok Silau , meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Girsang Sipang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Malela, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Gunung Maligas
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Haranggaol Harison, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Huta Bayu Raja
 - b. Kecamatan Jawa Meraja Bah Jambi
6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Jorlang Hataran
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Panei, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Panombeian Panei
8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pematang Sidamanik, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Sidamanik
 - b. Kecamatan Silimakuta
9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Purba.
10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Raya, meliputi wilayah kerja
 - a. Kecamatan Raya Kahean
11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Silau Kahean
12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Jawa
13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tapian Dolok
14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Ujung Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Peranan

1. Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.²¹ Konsep tentang Peran (role) menurut Komarudin dalam buku “ensiklopedia manajemen “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balau Pustaka, 1995), h.751

²¹ Soerjono Soekanto, *Terori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.243

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.²²
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. ia mengatakan bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002:243).

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

²² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:²³

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam masyarakat Petani, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam proses pembangunan masyarakat petani, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan Dinas Pengelolaan

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h.245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya Air dalam masyarakat, dan juga perilaku Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang penting bagi struktur sosial masyarakat petani. Selain itu, menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
- b. Peranan tersebut harus dilekatkan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebab masyarakat petani sudah menganggap dinas PSDA mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan semestinya;
- c. Dalam dinas pengelolaan sumber daya air kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat petani. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada organisasi instansi dan masyarakat petani. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan dari pada peranan.²⁴

Aspek-aspek peran menurut biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

B. Teori Pengawasan

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang sumber Daya Air yang lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi mendefinisikan pengawasan ialah pengawasan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada pemerintah, pemerintah/kota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat dan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, manual, pelaporan, memberikan rekomendasi dan penertiban.²⁵

Pengawasan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Rencana pengelolaan sumber daya air berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan

²⁴ Komaruddin, Op.cit, h. 76

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi Pasal 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konservasi sumber daya air, perencanaan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan pola pengelolaan sumber daya air. Pola pengelolaan sumber daya air dibuat berdasarkan wilayah sungai dengan memperhatikan prinsip keterpaduan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

a. Pengertian Pengawasan

Istilah mengenai pengertian pengawasan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “awas” dimana berarti pengawasan adalah aktifitas mengawasi atau mengamati sesuatu dengan teliti. Aktifitas lanjutan dari pengawasan adalah melaporkan hasil pengawasan tersebut. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶ Sedangkan menurut para ahli, pengawasan didefinisikan sebagai berikut :²⁷

Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai (Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir : 1998)

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

²⁶ Adisasmita Raharjo, *Manajemen Pemerintah*, (Yogyakarta : Graha ilmu, 2011), h.15

²⁷ <https://jurnal.manajemen.com>, diakses tanggal 12 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian : 2005).

Pengawasan adalah suatu proses yang menetapkan terkait hal yang harus dilaksanakan, tujuan dilaksanakannya hal tersebut, dan supaya yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (Soekarno K : 1986).

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Schermerhorn : 2002).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁸

²⁸ Mufham Al-Amin, *Manajemen Pengawasan*, (Jakarta : Kalam Indonesia, 2006), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip Pengawasan

Bahwa pada prinsipnya pengawasan itu penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas dalam suatu organisasi, baik organisasi usaha maupun organisasi pemerintah, sehingga pengawasan tersebut diadakan dengan maksud untuk yaitu sebagai berikut :²⁹

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- 2) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan dan mengetahui hasil kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- 3) Mengetahui hasil pekerja dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

c. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

1) Fungsi pengawasan

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan yaitu sebagai berikut :³⁰

- a. Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan masing-masing.

²⁹ Ibid., h.18

³⁰ Arifin Abdul Rachman, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 2001),h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai penilai terkait pengontrol aktivitas pengelolaan sumber daya air apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif.
- c. Pemantauan aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya.
- d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengawasan sumber daya air.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Tujuan pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
- b) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan Mencegah pemborosan dan penyelewengan
- c) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan
- d) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi
- e) Menjamin keberlangsungan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.

d. Jenis – jenis pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yaitu sebagai berikut :

1) Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit lembaga atau organisasinya. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang terdapat diluar unit lembaga atau organisasi yang diawasinya.

2) Pengawasan preventif atau represif

Pengawasan preventif atau represif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Sedangkan pengawasan represif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan.

3) Pengawasan aktif atau pasif

Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pengawasan kebenaran formil

Pengawasan kebenaran formil merupakan suatu bentuk pengawasan menurut hak dan memeriksa kebenaran materil terkait tujuan dilakukannya pengeluaran.

Tipe pengawasan berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan tersebut. Terdapat 2 (dua) tipe pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yaitu pengawasan yang bersifat rutin dan pengawasan mendadak atau sering dikenal dengan sidak. Pengawasan rutin dilakukan secara berkelanjutan dengan interval waktu tertentu atau berkala dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir bulan. Sedangkan pengawasan yang bersifat mendadak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.³¹

C. Teori Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat” yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Sedangkan menurut para ahli, pemanfaatan didefinisikan sebagai berikut :³²

Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna (Prof. Dr. J. S. Badudu : 2002).

³¹ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Granit, 2007),h. 29

³² <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan>, Diakses tanggal 15 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemanfaatan adalah proses atau cara, pembuatan untuk memanfaatkan sesuatu yang kita butuhkan (Hasan Alwin : 1998).

Pemanfataan adalah kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat (Poerwadarminto : 2002).

1. Pemanfaatan Sumber Daya Air

Di Indonesia, sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sumber daya air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya. Air adalah sumber daya yang terbahari, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat. Air ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kehidupan sehari-hari.

Penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya, seperti pemanfaatan sungai untuk transportasi air maupun pemanfaatan air untuk rumah tangga dan petani. Penggunaan sumber daya air ini dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.

Peranan air dalam kehidupan sangatlah banyak, terkadang dalam penggunaannya tidak dilakukan secara bijaksana, sehingga tidak memperhitungkan lagi dampak negatif yang dapat terjadi. Untuk itulah kesadaran atas penghematan dan upaya melestarikan sumber daya air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus ditanam dan dipupuk oleh semua manusia. Sumber daya air sangatlah banyak karena hampir 70% tertutupi air, yang pertama air laut 97 % dari total keseluruhan air dunia serta 3 % air tawar dan dari 3 % itupun 70 % berbentuk es. 30 % lainnya ada di danau, sungai, air permukaan dan air dalam tanah.³³

Berdasarkan letak dan asalnya air secara umum yaitu sebagai berikut :

a. Air permukaan

Jenis air permukaan merupakan air hujan yang mengalir di atas permukaan bumi dikarenakan tidak mampu terserap kedalam tanah dikarenakan lapisan tanahnya bersifat rapat air, sehingga sebagian besar air akan tergenang dan cenderung mengalir menuju daerah yang lebih rendah, air permukaan inilah yang sering disebut sungai.

1) Air sungai

Merupakan jenis air permukaan dengan tingkat kekotoran yang sangat tinggi. Paling sering digunakan oleh manusia seperti untuk irigasi, transportasi dan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.

2) Air angkasa

Air yang asalnya dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi. Perlu diketahui bahwa komposisi air yang

³³ Ir Trie M. Sunaryo, M. Eng, Dkk, *Pengeolaan Sumber Daya Air*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.23

terdapat di lapisan udara bumi berkisar 0.001% dari total air yang ada di bumi.³⁴ Menurut bentuknya air angkara terbagi menjadi :

a) Air hujan

Matahari berperan dalam mendorong proses terjadinya penguapan uap air yang ada di permukaan bumi naik hingga atmosfer. Disanalah uap air akan mengalami kondensasi sehingga berubah wujud menjadi titik air yang akan semakin berat dan akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan.

b) Air salju

Memiliki karakteristik yang sama dengan air hujan, hanya saja karena suhu udara disekitar yang lebih rendah sehingga titik air berubah menjadi es dan jatuh kembali ke bumi dan bentuk kepingan es bertekstur lembut yang sering disebut dengan salju.

c) Air es

Proses pembentukannya sama dengan air hujan dan salju, hanya saja udara saat terjadi kodensasi lebih dingin lagi sehingga membentuk butiran es yang ukurannya bervariasi. Sebenarnya es dapat terbentuk pada suhu yang lebih tinggi asalkan tekanan udara saat itu juga tinggi.

³⁴ Joetata Hadihardjaja, *Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA)*, (Jakarta: Gunadarma, 1997), h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Air tanah

Merupakan segala macam jenis air yang terletak di bawah lapisan tanah. Menyumbang sekitar 0.6% dari total air di bumi. Hal ini menjadikan air tanah lebih banyak dari pada air sungai dan danau bila digabungkan maupun air yang terdapat di atmosfer. Air tanah dapat dikelompokkan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Umumnya masyarakat lebih sering memanfaatkan air tanah dangkal untuk keperluan dengan membuat sumur hingga kedalaman tertentu sekitar 9 hingga 15 meter dari bawah permukaan tanah.³⁵

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang merupakan revisi terhadap Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan memberikan wewenang kepada pemerintah dalam pasal 3 ayat 2 yaitu :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan/atau sumber-sumber air.
- b. Menyusun, mengesahkan dan memberikan izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata guna air dan tata perairan.
- c. Menyusun, mengesahkan dan memberikan izin peruntuk, penggunaan, peyediaan air, dan/atau sumber-sumber air.

³⁵ H.R. Mulyanto, *Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan air diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Ada beberapa pemanfaatan sumber daya air bagi kehidupan manusia yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai sumber pengairan dalam pertanian dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga
 - b. Sebagai sumber tenaga listrik dan sebagai bahan baku
 - c. Sebagai media kebersihan dan sebagai indikator kelestarian lingkungan
 - d. Memperlancar perekonomian rakyat
2. Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Setelah mengetahui manfaat air, maka perlu juga diketahui kebijakan apa saja yang harus dibuat dalam pemanfaatan sumber daya air agar kelestarian sumber daya air tetap terjaga. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dapat diterapkan dalam pemanfaatan sumber daya air.

- a. Penyediaan air harus memenuhi syarat, yaitu air yang berkualitas dan berkuantitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Sistem irigasi dan rawa harus dikembangkan, sehingga dapat membantu produktivitas di bidang pertanian, meningkatkan ketahanan pangan dan mensejahterakan petani.
- c. Efisiensi dan efektivitas penggunaan air untuk irigasi harus ditingkatkan, dengan cara mengutamakan pemeliharaan, kegiatan

³⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta : PT, Indeks Kelompok Gramedia, 2004),h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasi, peningkatan kerja serta rehabilitasi daripada pembangunan irigasi yang baru.

- d. Pemanfaatan sumber daya air harus mendukung perekonomian rakyat secara efektif dan efisien, dengan cara membuat pertimbangan kepentingan antar sektor dan antar wilayah.
- e. Prinsip penanggungungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air harus diterapkan bagi penerima manfaat air.
- f. Peran dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air harus tetap mengedepankan kepentingan umum.
- g. Perlu dibuat pengendalian pencemaran sumber daya air, terutama untuk sumber air tanah, sungai dan danau.³⁷

Pemanfaatan sumber daya air merupakan hal yang cermati. Dalam upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya air maka terdapat empat hal penting yang perlu diketahui yaitu :³⁸

- a. Efisiensi penampungan

Untuk efisiensi penampungan maka diupayakan bahwa air hujan datang untuk ditampung baik secara alamiah maupun artifisial melalui panen hujan dan aliran permukaan. Upaya panen hujan dan aliran permukaan memiliki dampak ganda karena selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk petanaman, pada usaha tani lahan kering dan hasil panen hujan dan aliran permukaan dalam jumlah

³⁷ *Ibid.*, h. 39

³⁸ Sitanala Arsyad Dan Ernan Rustiad, *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*, (Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang banyak dapat dimanfaatkan dalam antisipasi untuk memperpanjang masa tanam di akhir musin hujan.

b. Efisiensi penyimpanan

Panen air mengarah pada konsentrasi dalam skala kecil, pengumpulan, penyimpanan dan pemanfaatan aliran permukaan untuk keperluan pertanian, air selanjutnya akan dikumpulkan dan dimanfaatkan di dalam waduk dan kemudian air digunakan untuk berbagai keperluan, melalui rumah tangga, irigasi dan konsumsi ternak.

c. Efisiensi penyaluran

Penghematan air dalam pemanfaatan melalui peningkatan efisiensi penggunaan air pertanian disarankan sebagai kesiapan dalam mengantisipasi permintaan yang akan datang ketika kebutuhan yang akan meningkat. Jadi pertanian beririgasi (lahan sawah) semakin meningkat. pengelolaan yang kurang baik disebut sebagai penyebab yang paling sering dalam ketidakefisiensinya penggunaan air dalam perencanaan irigasi.

d. Efisiensi pemanfaatan

Pemanfaatan air di petakan sawah juga harus selalu berlangsung supaya tidak mengakibatkan dampak negatif terangkutnya senyawa-senyawa penting dalam tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan sumber daya air termasuk sumber mata air yang meliputi beberapa aspek antara lain yaitu sebagai berikut : pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian.³⁹

a. Aspek pemanfaatan

Pemanfaatan sumber daya air termasuk sumber mata air ini biasanya untuk berbagai keperluan misalnya untuk kebutuhan domestik, irigasi dan pertanian, pembangkit listrik, pelayaran di sungai serta industri dan pariwisata. Biasanya yang terlintas dalam pikiran manusia adalah aspek pemanfaatan ini. Setelah terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar akan aspek yang lain.

b. Aspek pelestarian

Agar aspek pemanfaatan dapat berkelanjutan maka sumber daya air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah atau mutunya. Menjaga daerah tangkapan hujan, menjaga air dari pencemaran limbah merupakan bagian dari pengelolaan.

c. Aspek pengendalian

Selain memberi manfaat air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi, karena itu tidak boleh dilupakan adalah pengendalian terhadap daya rusak yang berupa banjir dan pencemaran.

³⁹Mohammad Taufik Makarao, *Op.cit.*, h 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Teori Irigasi

Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada musim kemarau jumlah air yang ada tentu tidak sebanyak seperti pada musim penghujan. Pada musim kemarau inilah lahan pertanian memerlukan air untuk tanaman, maka petani berusaha untuk mendapatkan air dengan cara pemanfaatan saluran-saluran air yang dapat mengairi lahan pertanian. Inilah yang dimaksud dengan usaha untuk mendapatkan air.

Undang-undang sumber daya air memberikan wewenang kepada negara untuk menentukan hak guna air. Pemegang hak guna air berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air dan perlindungan serta pengamanan prasarana sumber daya air. Hak guna air ini dibedakan atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Substansi hak guna air meliputi hak untuk mengalirkan air ke tanahnya melalui tanah orang-orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. Hak guna pakai memerlukan izin jika :

1. Penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber daya air.
2. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penggunaan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.⁴⁰

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi mendefinisikan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertaniann yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa dan tambak.

1. Pengertian Irigasi

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.⁴¹ Sedangkan menurut para ahli, Irigasi didefinisikan sebagai berikut :

Menurut Hansen Vaughn E, Irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanam-tanaman.

Menurut Mawardi, Irigasi adalah usaha untuk mendapatkan atau memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk penunjang produksi pertanian.

Menurut Hansen dkk, Irigasi adalah peenggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan

⁴⁰ Prof.Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.*Op.cit*.h. 203

⁴¹ Ir.Dendy Mochammad Bardan, *Irigasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanam-tanaman atau irigasi adalah sejumlah air yang pada umumnya diambil dari sungai atau bendung yang dialirkan melalui sistem jaringan irigasi untuk menjaga keseimbangan jumlah air di dalam tanah.

Menurut Kartaspoetra, Irigasi adalah kegiatan penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kepentingan pertanian dengan memanfaatkan air yang berasal dari air permukaan dan tanah.

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

- a. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 - b. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 - c. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersir, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.⁴²
2. Bentuk – Bentuk Sistem Irigasi

Ada beberapa bentuk sistem irigasi yaitu sebagai berikut :

⁴² Sidharta. SK, *Irigasi dan Bangunan Air*, (Badan Penerbitan Gunadarma, 1997), h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Irigasi Permukaan adalah dengan menggunakan teknik pengambilan air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendung atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air.
- b. Irigasi bawah permukaan adalah jenis irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Digerakkan oleh gaya kapiler, lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman.
- c. Irigasi dengan pancaran adalah irigasi yang termasuk irigasi lebih modern karena baru dikembangkan belakangan ini, caranya adalah dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran dengan menggunakan pipa. Dilahan yang menjadi sasaran, ujung pipa disumbat menggunakan tekanan khusus dari alat pencurah sehingga muncul pancaran air.
- d. Irigasi pompa air adalah irigasi yang menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis-jenis air dari sumber air, biasanya sumur, ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Sumber air yang digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan, jika tidak air sumur tidak surut pada musim kemarau.
- e. Irigasi mikro dan irigasi tetes adalah irigasi tetes merupakan cara pemberian air pada tanaman secara langsung, baik pada permukaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah maupun di dalam tanah melalui tetesan secara sinambung dan perlahan pada tanah di dekat tumbuhan. Alat pengeluaran air pada sistem irigasi tetes disebut emitter atau penetes.⁴³

3. Tujuan dan manfaat sistem irigasi

a. Tujuan sistem irigasi

Dalam tujuan irigasi akan dibahas tujuan irigasi secara langsung dan tidak langsung yaitu sebagai berikut :

1) Tujuan irigasi secara langsung

Tujuan irigasi secara langsung adalah membasahi tanah, agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara diantara butir-butir tanah. Pemberian air dapat juga mempunyai tujuan sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

2) Tujuan irigasi secara tidak langsung

Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah pemberian air yang dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara antara lain yaitu mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, memberantas hama, mempertinggi permukaan air tanah dan membersihkan buangan air.⁴⁴

⁴³ Ibid., h.55

⁴⁴ Kristo Temang. “ *Pengertian Dan Ruang Lingkup Irigasi*” Sumber: <http://kritotemang.blogspot.co.id/2013/04/pengertian- dan-ruang-lingkup-irigasi.html> diakses 14 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat sistem irigasi

Beberapa manfaat irigasi yang harus diketahui diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Melancarkan aliran air ke lahan sawah
- 2) Mencukupi kebutuhan pada lahan pertanian
- 3) Mempermudah para petani untuk mengairi lahannya
- 4) Salah satu sarana pendukung ketahanan pangan.
- 5) Meningkatkan kesuburan tanah
- 6) Kolmatase yaitu meninggikan tanah yang di dataran rendah seperti rawa-rawa dengan endapan lumpur yang terbawa oleh air irigasi.⁴⁵

4. Fungsi Irigasi

Fungsi irigasi pada prinsipnya adalah menambah kekurangan air pada lahan pertanian yang diperoleh dari air hujan atau air tanah, karena jumlah air yang diberikan kepada tanaman tidak mencakupi kebutuhan tanaman. Ada 9 fungsi dari irigasi yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai simpanan supply air jika saat terjadi kekeringan akibat kemarau panjang, sehingga tanaman pertanian bisa tetap ditanam dan dipanen. Irigasi di sini sekaligus juga mengatur jadwal dan porsi pembasahan tanah sehingga dalam musim apapun, lahan pertanian bisa dialiri air dan tanaman bisa tumbuh.

⁴⁵ Cita Rahmi. “ Ini Dia Manfaat Irigasi Yang Harus Diketahui” Sumber: <http://kur1p4n.blogspot.co.id/2015/05/ini-dia-manfaat-saluran-irigasi-yang.html> diakses 15 April 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memenuhi kebutuhan air pada tanaman pertanian.
- c. Mengalirkan air yang memuat zat lumpur serta zat hara penyubur tanaman untuk menyuburkan tanah menjadi lahan pertanian sehingga tanah siap ditanami dan menghasilkan tumbuhan yang juga subur dan baik.
- d. Mengalirkan air yang akan berfungsi mengendapkan kotoran atau limbah di dalam tanah ke dalam lapisan bawah (saluran drainase) sehingga tidak mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan menghindari terjadinya erosi tanah.
- e. Mengendapkan zat-zat garam dari permukaan tanah ke tanah lapisan bawah sehingga di permukaan, kadar garam akan menurun.
- f. Menyiapkan tanah untuk mengalami proses pengolahan dengan terlebih dahulu melunakkannya. Lunaknya tanah akan mempermudah proses pengolahan karena tanah yang keras akan sulit diolah semisal dicangkul atau dibajak.
- g. Meninggikan tanah yang posisinya rendah. Lumpur yang terkandung dalam air irigasi dapat memungkinkan hal ini terjadi sehingga tanah yang potensi untuk pertanian dapat digunakan lebih maksimal.
- h. Menurunkan suhu dalam tanah sehingga kondusif untuk pertanian.
- i. Mengurangi kemungkinan kerusakan tanah yang diakibatkan oleh embun beku (frost).⁴⁶

⁴⁶ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/jenis-jenis-irigasi>. diakses pada tanggal 18 April

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kedudukan Penggunaan Air Untuk Irigasi

Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, khususnya pasal 36 yaitu “ air irigasi ditunjukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya”.⁴⁷ Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemberian air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air irigasi untuk tanaman dilihat dari jenis tanaman, cara pemberian air, jenis tanah yang digunakan, cara pengelolaan pemeliharaan saluran dan bangunan, pengolahan tanah, iklim dan keadaan cuaca.

Potensi perekonomian kabupaten Simalungun sebagian besar terletak pada produksi pertaniannya. Produksi lainnya adalah hasil industri pengolahan dan jasa. Untuk itu tak dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia sangat bergantung dengan air sebagai sumber daya untuk menunjang kehidupannya. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan pemanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Masyarakat petani di kecamatan Bandar Huluan kabupaten Simalungun yang menggunakan air untuk irigasi yaitu kurang lebih 75 % dan 25% nya lagi untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat.

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pasal 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanaman padi sawah memerlukan curah air antara 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun dengan ketinggian tempat optimal 0-1500 mdpl.

E. Kedudukan dan Mekanisme Pengawasan Dinas PU Tentang Irigasi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

1. Kedudukan Pengawasan Dinas PU Tentang Irigasi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴⁸

Bunyi UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3) tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum tanah nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu dipergunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Irigasi sebagai salah satu unsur dalam menunjang sarana dan prasarana bagi petani yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang,

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan agar bisa memberi kemakmuran ekonomi dan mensejahterakan nasional.

Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejeninya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Kemudian diterapkan pada daerah irigasi yang merupakan kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sistem irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.

Peraturan penyelenggaraan irigasi secara teknis diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 16, pasal 31, pasal 36, pasal 41, pasal 47, pasal 51, pasal 56, pasal 65, pasal 75 dan pasal 85. Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dimaksudkan pasal 2 yaitu sebagai acuan bagi pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna jaringan irigasi lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.⁴⁹

Pasal 2 ayat 2 yaitu ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, wewenang dan tanggung jawab, koordinasi pengelolaan sistem irigasi, pemberdayaan, partisipasi masyarakat petani/ P3A/ GP3A /IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, syarat dan tata laksana partisipasi, serah pemantauan/pengawasan dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Penanggung jawab kegiatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di suatu wilayah. Menteri yang berperan yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. Dinas yaitu instansi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidang irigasi.

Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

⁴⁹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pasal 33 yang berbunyi: “pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh Direktorat terkait, balai besar wilayah sungai/ balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya”. P3A/GP3A /IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas kepada instansi yang berwenang.

Tujuan dari peraturan tersebut agar wewenang, tugas, tanggung jawab lembaga pengelolaan irigasi provinsi dan kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi provinsi dan kabupaten/kota guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

2. Mekanisme Pengawasan Pekerjaan Umum Tentang Irigasi Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

a. Mekanisme Pengawasan

Pemerintah Pusat dipimpin oleh kepala negara/Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang berbunyi: wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional mengenai sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya.
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- c. Mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
- d. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Selanjutnya menurut pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang berbunyi: “Pemerintah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah daerah menyelenggarakan Pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air⁵⁰. Kemudian secara teknisnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pada pasal 3 pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.

Pembinaan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan. Aspek pengaturan mencakup perumusan dan penentuan kebijakan umum maupun teknis operasional. Aspek pengendalian mencakup pemberian pengarahan bimbingan dalam pembangunan dan pengoperasian irigasi serta pemanfaatan sumber daya air. Sedangkan aspek pengawasan dilakukan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air, Pasal 16 dan Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tata Cara Yang Dilakukan Atau Teknis Pengawasan

Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A, dan pengguna jaringan irigasi lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan seperti berikut:

- 1) Menyusun pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- 2) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- 3) Menetapkan norma, standar, criteria, dan pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- 4) Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dari 300 ha, atau pada daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas Negara dan daerah irigasi strategis nasional.
- 5) Memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
- 7) Memberikan izin pembangunan, pengawasan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional dan
- 8) Melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani.

Bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, antara lain berupa bimbingan teknis, tenaga, peralatan, konsultasi, dan/atau melalui kegiatan lomba.

- 1) Persyaratan dan tata laksana partisipasi.
 - a) Partisipasi masyarakat petani dalam pengawasan, pemanfaatan, pembangunan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui kelompok petani pada setiap desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Partisipasi masyarakat petani dalam meningkatkan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan melalui:
 - a. P3A/GP3A/IP3A;
 - b. Organisasi adat pengelolaan irigasi.
 - c) Masyarakat petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
 - d) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pengawasan, pembangunan, dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi
 - 1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan prinsip pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
 - 2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh direktorat terkait, balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

- 3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemantauan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan dan
 - b. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- 4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada periode selanjutnya.
- 3) Pengawasan
 - a) Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh Direktorat terkait, Balai Besar Sungai/ Balai Wilayah Sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan:
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaporan
- c. Pemberian rekomendasi dan
- d. Penertiban

c) P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.⁵¹

c. Hubungan Dinas Pekerjaan Umum dengan Irigasi

Dinas pekerjaan umum yaitu suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang dan mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Adapun tugas Kepala Bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok pembantuan Kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber

⁵¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Dan Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, inventarisasi, sarana pengairan/sumber daya air serta bangunan pelengkap dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar Hulan kabupaten Simalungun berdasarkan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 30/prt/m/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pada pasal 10 ayat (1) pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Pasal 32 ayat (1) kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan prinsip pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasi primer dan sekunder dan pasal 33 (1) pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilakukan oleh direktorat terkait, balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai dan dinas provinsi yang melakukan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan sesuai dengan kewenangannya yang dalam hal ini dilakukan oleh dinas PU bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lembaga UPTD. Selanjutnya pada ayat 2 pasal 32 mengatakan bahwa oleh PU dan UPTD meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, manual, pelaporan, pemberian rekomendasi dan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket pada pemilik lahan persawahan banyak yang mengatakan bahwa dinas PU ataupun UPTD jarang sekali turun ke lokasi persawahan untuk memantau atau pengawasan saluran jaringan irigasi secara keseluruhan, tunggu adanya pelaporan dari pihak petani baru dinas PU dan UPTD melakukan pengawasan dan apabila turun hanya pada saat melakukan proses pembangunan tembok saluran, tembok penahan dan bangunan saluran irigasi.

2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh dinas PU dan UPTD memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya
 - a. Kurangnya pertanggung jawaban dalam pengawasan terdapat pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi yang dilakukan oleh pihak PU yang dilimpahkan kepada UPTD yang lebih bertanggung jawab atas kondisi lapangan aliran jaringan irigasi. Setiap pekerjaan seharusnya memiliki kualitas agar pekerjaan yang dikerjakan menghasilkan hasil yang dengan maksimal.
 - b. Terlalu banyaknya bangunan irigasi dan saluran irigasi sehingga mengalami kebocoran di saluran primer, sekunder dan tersier yang disebabkan pencurian air (lobang tikus) yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa petani yang tidak bertanggung jawab dan ada juga kendala yang tidak terduga yaitu disebabkan oleh faktor alam, ataupun karena sudah terlalu lama bangunan saluran irigasi yang mengakibatkan kebocoran dan air tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-biaknya

- c. Tumpukan lumpur disaluran melampaui ketinggian yang diizinkan, sehingga dapat mengurangi kelancaran pengairan ke tempat lain dan jumlah air mengalir pun tidak dapat memenuhi kebutuhan irigasi.
- d. Sebagian petani memanfaatkan sawahnya untuk pendederan (pembesaran anak ikan) sehingga mengganggu jadwal tanam dan jadwal irigasi.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

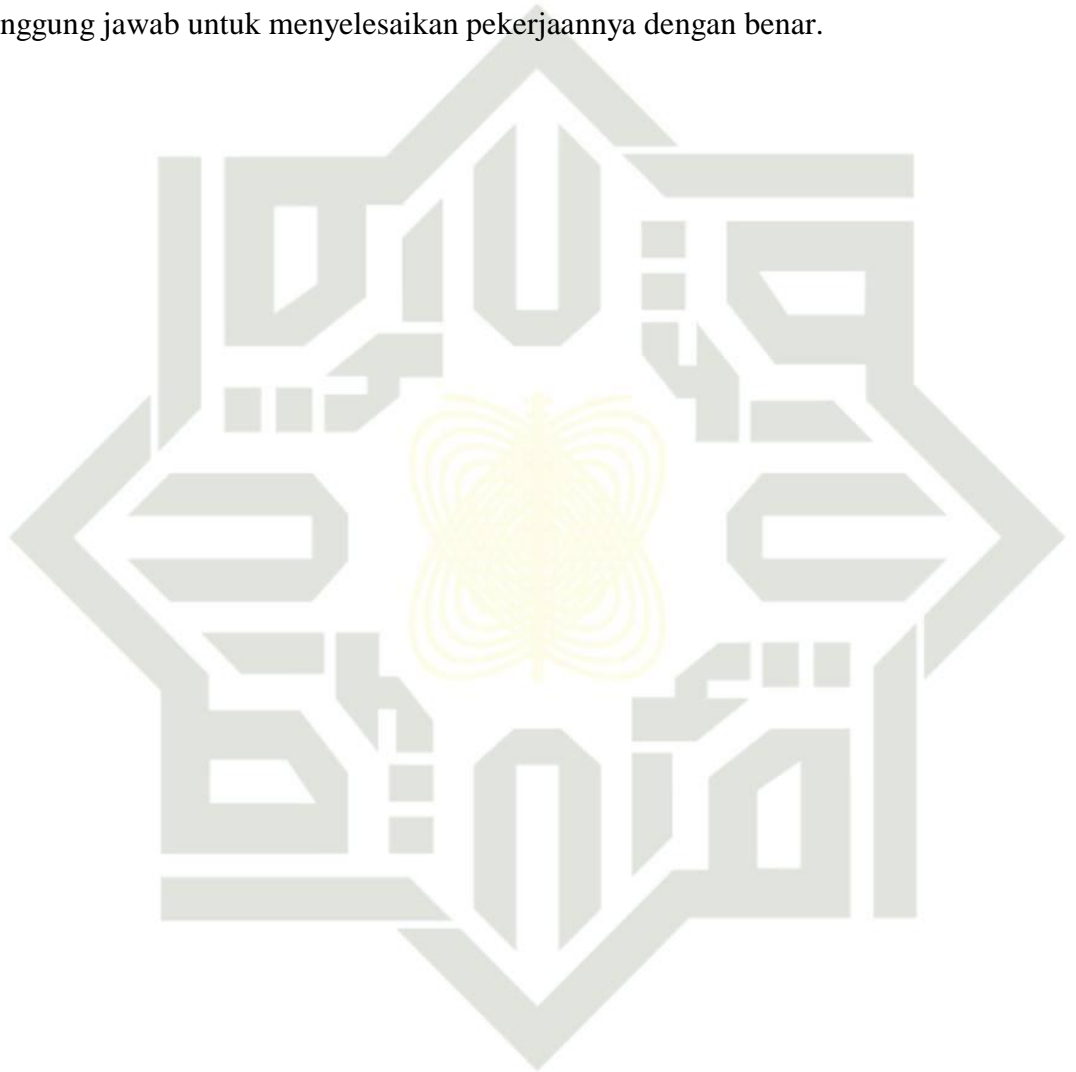
1. Seharusnya Dinas PU atau UPTD harus lebih memberikan pemahaman kepada pihak petani seperti melakukan sosialisasi kepada para pihak petani sekurang-kurangnya setahun sekali. kemudian petugas Dinas PU atau UPTD harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kecamatan Bandar huluan kabupaten simalungun supaya tidak ada saling rebutan air antara petani untuk menghindari keributan. Serta Dinas PU ataupun UPTD juga harus menyediakan dan memelihara fasilitas saluran irigasi seperti memperbaiki, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi baru dan/atau

yang sudah ada. Agar hasil produksi petani di kecamatan Bandar huluan kabupaten simalungun meningkat dari tahun sebelumnya.

2. Dinas PU ataupun UPTD dalam pengawasan irigasi seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar pekerjaan serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Jakarta: Kalam Indonesia
- Amiruddin dan Zainar Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers.
- Bardan, Dendy Mochammad. 2014. *Irigasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djajaatmadja, Bambang iriana. 2007. *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Effendi, Hefini. 2003. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisus.
- Hadihardjaja, Joetata. 1997. *Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA)*. Jakarta: Gunadarma.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksarah.
- Marbun, S.F. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mulyanto, H.R. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Pramudyanto, Bambang dan Hamrat Hamid. 2007. *Pangawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Granit.
- Racham, Arifin Abdul. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV.Haji Mas Agung.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1988. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Raharjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rustiad, Ernan dan Sitanala Arsyad. 2012. *Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.

SK, Sidharta. 1997. *Irigasi dan Bangunan Air*. Badan Penerbitan Gunadarma

Supriadi. 2015. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunaryo, Trie M. 2007. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Malang: Bayumedia Publishing

Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor. 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan system irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

C. Jurnal

[https://jurnal manajemen. Com](https://jurnal.manajemen.com), diakses tanggal 12 April 2019

Repository.usu.ac.id.Sejarah Kabupaten Simalungun. Diakses pada tanggal 17 April 2019

KabupatenSimalungun,https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simalungun, Diakses Pada Tanggal 15 April 2019

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>. Diakses tanggal 15 April 2019

sto Temang. “ *Pengertian Dan Ruang Lingkup Irigasi* ” Sumber:

<http://kritotemang.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-irigasi.html> diakses 14 April 2019

Cita Rahmi. “ *Ini Dia Manfaat Irigasi Yang Harus Diketahui* ” Sumber:

<http://kur1p4n.blogspot.co.id/2015/05/ini-dia-manfaat-saluran-irigasi-yang.html> diakses 15 April 2019

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/jenis-jenis-irigasi>. diakses pada tanggal 18 April 2019



DAFTAR WAWANCARA

1. Upaya apa saja yang dilakukan dinas pu dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi ?
2. Apa saja sikap yang diberikan dalam memberikan fasilitas irigas dan mensejahterakan masyarakat petani ?
3. Dalam proses pengawasan irigasi adakah jangka waktu yang dilakukan dinas pu? Dan upaya apa yang dilakukan jika ada penikatan dalam irigasi atau persoalan dalam irigasi ?
4. Apakah dari pihak dinas pu sendiri ada melakukan sosialisasi tentang wawasan/pemahaman terhadap mengembangkan irigasi ? dan dalam setahun ada berapa kali di adakan sosialisasi oleh dinas pu sendiri ?
5. Mekanisme apa saja yang dilakukan dan yang di berikan agar distribusi air irigasi berjalan dengan merata ?
6. Bagaimana sikap dari dinas pu selaku pengawasan irigasi jika sumber daya air untuk irigasi berkurang atau berlebih ? dan upaya apa yang dilakukan dari dinas pu sendiri?
7. Berapa anggaran yang disediakan untuk pengawasan irigasi dan kemana saja anggaran tersebut di kelolah ?

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal/Bulan/Tahun
1.	Delman Gultom,ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten simalungun	Wawancara, Senin 10 Juni 2019
2.	Sangkot Sirait,SH	Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air Bandar	Wawancara, Rabu 19 Juni 2019
3.	Mariccon Sinaga	Pemeriksa sektor/staf lapangan	Wawancara, Kamis 20 Juni 2019
4.	Dedi Irwansyah	Pemeriksa sektor/staf lapangan	Wawancara, Kamis 20 Juni 2019
5.	Iskandar Damanik	Pemeriksa sektor/staf lapangan	Wawancara, Jumat 21 Juni 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah menurut bapak/ibu aliran irigasi dipersawahan di kecamatan bandar huluan kabupaten simalungun sudah berjalan dengan lancar ?
2. Jika terjadi masalah kecuraan air dalam aliran irigasi salah seorang petani yang dilakukan dapat merugikan petani lain, apakah ada tindakan dari dinas pu ?
3. Jika dinas pu memberikan layanan dalam berupa alat untuk memasok air, apakah ada biaya yang di pungut dari masyarakat petani, jika ada berapa pungutan tersebut?
4. Apakah ada sikap dari dinas pu dalam pengawasan terhadap pemanfaatan air untuk irigasi jika terjadi musin kemarau dan musin hujan, adakah tindakan dari dinas pu ?
5. Sepengetahuan bapak/ibu adakah pengawasan rutin atau pemantauan yang dilakukan oleh dinas pu dalam pengawasan irigasi dan berapa bulan sekali di lakukan ?

No.	Nama pemilik sawah	Pekerjaan	Tanggal/bulan/tahun
1.	Bapak Samsudin	Petani	Kamis 4 Juli 2019
2.	Bapak Syukur	Petani	Kamis 4 Juni 2019
3.	Ibu jumiati	Petani	Kamis 4 Juli 2019
4.	Ibu Toni Saragih	Petani	Kamis 4 Juli 2019
5.	Bapak M. Adi Sinaga	Petani	Kamis 4 Juli 2019
6.	Bapak M. Joko	Petani	Kamis 4 Juli 2019
7.	Ibu Siti	Petani	Kamis 4 Juli 2019
8.	Bapak Kiman	Petani	Kamis 4 Juli 2019
9.	Ibu Suci	Petani	Kamis 4 Juli 2019
10.	Ibu Amel	Petani	Kamis 4 Juli 2019
11.	Ibu Saiman	Petani	Kamis 4 Juli 2019
12.	Ibu Ria sinaga	Petani	Kamis 4 Juli 2019
13.	Ibu dongsia manik	Petani	Kamis 4 Juli 2019
14.	Bapak zaiman	Petani	Kamis 4 Juli 2019
15.	Bapak Jami'in	Petani	Kamis 4 Juli 2019
16.	Ibu Butek	Petani	Kamis 4 Juli 2019
17.	Bapak Posma Saragih	Petani	Kamis 4 Juli 2019
18.	Bapak Legimen	Petani	Kamis 4 Juli 2019
19.	Bapak Amin	Petani	Kamis 4 Juli 2019
20.	Ibu dede	Petani	Kamis 4 Juli 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21.	Ibu Arnik	Petani	Jumat 5 Juli 2019
22.	Ibu Ani	Petani	Jumat 5 Juli 2019
23.	Ibu Rita	Petani	Jumat 5 Juli 2019
24.	Bapak Riki	Petani	Jumat 5 Juli 2019
25.	Bapak P. Siregar	Petani	Jumat 5 Juli 2019
26.	Bapak B. Simarmata	Petani	Jumat 5 Juli 2019
27.	Bapak julman	Petani	Jumat 5 Juli 2019
28.	Bapak Raya	Petani	Jumat 5 Juli 2019
29.	Ibu ramin	Petani	Jumat 5 Juli 2019
30.	Bapak Tono	Petani	Jumat 5 Juli 2019
31.	Bapak Udin	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
32.	Bapak Iwan	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
33.	Bapak Anggara	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
34.	Ibu Anggi	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
35.	Ibu Arfan	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
36.	Bapak Jamahir	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
37.	Bapak Mahmud	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
38.	Bapak Kusim	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
39.	Bapak Utoh	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
40.	Bapak Dedi	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
41.	Ibu ramli	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
42.	Ibu Herman	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
43.	Ibu Sudirman	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
44.	Bapak Rusli	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
45.	Bapak sumadi	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
46.	Bapak Yogi	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
47.	Bapak Supianto	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
48.	Bapak Randi	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
49.	Ibu Salam	Petani	Sabtu 6 Juli 2019
50.	Ibu Eem	Petani	Sabtu 6 Juli 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.”, yang ditulis oleh :

Nama : **SURYA NINGSIH DAMANIK**
 NIM : 11527203971
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, S.HL., MH

Penguji I
Drs. Arifuddin, MA

Penguji II
Syafrinaldi, SH., MA

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Asfendi, S.Ag., M.Si
 NIP. 19610918 198831 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Ilham Akbar, S.HI., SH., MH
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Agustus 2019

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. Surya Ningsih Damanik

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Surya Ningsih Damanik, yang berjudul **"Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/Prt/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhataianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Ilham Akbar, S.HI., SH., MH.
NIP. 19760420 200901 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Mei 2019

: Un.04/F.I/PP.00.9/4161/2019
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SURYA NINGSIH DAMANIK
NIM	: 11527203971
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: 1. Dinas pekerjaan umum perumahan dan penataan ruang Kabupaten simalungun di pematang raya. 2. Dinas pekerjaan umum perumahan dan penataan ruang UPTD Bandar bidang PSDA Kabupaten simalungun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
"Peranan dinas pekerjaan umum dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air
untuk irigasi di kecamatan bandar huluan kabupaten simalungun berdasarkan peraturan
menteri pekerjaan umum no.30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN PENATAAN RUANG
UPTD BANDAR BIDANG PSDA**

SURAT KETERANGAN

No : 600/28/UPTD/VII/2019

Kepala UPTD Bandar Bidang PSDA Dinas PUPPR Kabupaten Simalungun dengan ini menerangkan :

Nama : SURYA NINGSIH DAMANIK
NIM : 11527203971
Program Studi : Ilmu Hukum (S.1)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"PERANAN PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI "**

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bandar, 03 juli 2019

Kepala UPTD Bandar



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. N A M A | : Surya ningsi damanik |
| 2. NOMOR MAHASISWA | : 11527203971 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Peranan dinas pekerja umum dalam pengawasan dan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di kabupaten simalungan berdasarakan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 36/prt/m/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi |
| 4. Hari/Tgl. Diseminarkan | : Rabu / 27 Maret 2019 |
| 5. Hasil Seminar dirumuskan adalah | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| a. Judul | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| c. Permasalahan | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| g. Metode Penelitian | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |
| h. Daftar Pustaka | |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Peri Pirmansyah, SH, MH

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi" ditulis oleh saudara :

Nama : SURYA NINGSIH DAMANIK
NIM : 11527203971
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 27 Maret 2019
Narasumber : PERI PIRMANSYAH, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

ASFENDI, S.Ag, Msi
NIP. 19610918 19803 1 002

Pekanbaru, 1 April 2019

Narasumber

PERI PIRMANSYAH, SH, MH
NIK. 130 217 120

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



USKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5182/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : SURYA NINGSIH DAMANIK
N I M : 11527203971
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Mei 2019

Dekan,



Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/22636
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Suratohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/4161/2019 Tanggal 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SURYA NINGSIH DAMANIK |
| 2. NIM / KTP | : | 11527203971 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN BANDAR HULUAN KABUPATEN SIMALUNGUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.30/PRT/M/2015 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIMALUNGUN DI PEMATANG RAYA 2. DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG UPTD BANDAR BIDANG PSDA KABUPATEN SIMALUNGUN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Mei 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-529 /BKB.P

1. Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
2. Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Pemeintah Provinsi Riau Nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/22636 Tanggal 10 Mai 2019 Perihal Rekomendasi Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

- | | |
|---------------------|--|
| a. Nama | : Surya Ningsih Damanik |
| b. Alamat | : Pekanbaru |
| c. Pekerjaan | : Mahasiswi |
| d. Nip/Nim/KTP | : 11527203971 |
| e. Judul | : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi |
| f. Lokasi/Daerah | : Kabupaten Simalungun |
| g. Lamanya | : 3 (Tiga) Bulan |
| h. Peserta | : Sendiri |
| i. Penanggung Jawab | : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
 - b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
 - c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir 2 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 20 Mei 2019
An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA

KABID PENANGANAN KONFLIK DAN

KEWASPADAAKSI NASIONAL

ROMANTO TARBUNAN, SE, MSI
KABID BINA UTAMA MUDA
NIP. 19640526 199803 1 002

Tembusan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIMALUNGUN
 PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
 NO 070 / 126 / 31 / 2019

1. Dasar Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 070/185 a/24.5/2019, tanggal 31 Mei 2019 Perihal Izin Penelitian kepada:

Nama : Surya Ningsih Damanik.
 Alamat : AFD. IV Sei Berlian RT/RW : 005/007 Kelurahan Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu.
 Judul : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
 Penanggung Jawab : Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag (Dekan)

2. Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Izin Penelitian dimaksud ketentuan agar tetap menjaga TATA TERTIB dan KEAMANAN selama menjalankan Pelaksanaan Izin Penelitian.
3. Dalam rangka pengawasannya supaya Laporan Izin Penelitian saudara dapat disampaikan kepada Bupati Simalungun c/q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun.
4. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

Pamatang Raya, 31 Mei 2019
 An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN SIMALUNGUN
 SEKRETARIS,

 WULLY SURYA DARMA D, SSTP, M.Si.
 PENATA TK. I.
 NIP. 198106012001101002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**

Kode Pos : 21162

Pamatang Raya, 10 Juni 2019

Nomor : 800 / 503.1 / 6.1/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
**Kepala UPTD Bandar
Kabupaten Simalungun**

di -

Bandar

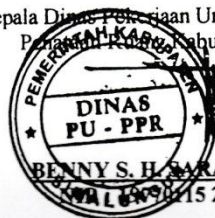
Sesuai dengan Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Nomor : 070-929 / BKB.P dan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simalungun Nomor : 070/126/31/2019 tentang ijin Penelitian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama : SURYA NINGSIH DAMANIK
Alamat : AFD IV Sei Berlian RT/RW : 005/007 Kelurahan Senama
Nenek Kecamatan Tapung Hulu.
Pekerja : Mahasiswa

Dengan ini kami merekomendasikan untuk melakukan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun di UPTD Bandar Bidang PSDA Kabupaten Simalungun, dengan Judul Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Bandar Hulu Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Meteri Pekerjaan Umum No. 30 /PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Demikian hal ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik baiknya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun



BENNY S. H. SARAGIH, ST. M. Si
NIP. 19650215 200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SURYA NINGSIH DAMANIK, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 02 April 1997 merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Sukiman Damanik dan Ibunda Ngatini. Pada tahun 2003, Penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 095256 Pematang Bandar.

Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Pematang Bandar 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012.

Tamat dari SMP Negeri 1 tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Bandar 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XVII di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, atas berkat dan rahmat Allah SubhanahuWaTa'alasertado'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi”** di bawah bimbingan langsung Bapak Ilham Akbar, SHi., SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 12 September 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Yakin Usaha Sampai.